

# **KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oleh:  
**SUMI LISA**  
NIM. E01111029

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016  
Email: [Sumiprotektif1@gmail.com](mailto:Sumiprotektif1@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk mengetahui capaian dalam penyusunan rencana kerja daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pencapaian kinerja penyelenggara pembangunan daerah dan kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Untuk menganalisis masalah ini, peneliti ini menggunakan teori Dharma (2001: 154) yaitu dengan pengukuran sebagai berikut: a) Kuantitas; b) Kualitas; dan c) Ketepatan Waktu. Hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini adalah pada pertumbuhan ekonomi yang realisasinya tidak tercapai target sebesar 5,02% dan pada indikator pembangunan manusia yang sama sekali belum ada realisasinya ini dapat dikatakan belum/ tidak berhasil dilihat dari segi kuantitas. Selanjutnya kepuasan berdasarkan yang dirasakan masyarakat terhadap capaian kualitas kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar belum begitu baik karena masyarakat beranggapan masih ada penduduk yang mengalami gizi buruk dana anak-anak yang tidak bisa bersekolah artinya penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi di Kalbar belum begitu baik maupun berkualitas. Kemudian dari segi ketepatan waktu ternyata mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan realisasinya terhambat seperti lambatnya proses pencairan dana dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sehingga proses perealisasi berikutnya juga mempengaruhi penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

Kata-kata Kunci : Bappeda, Rencana Kerja, Capaian, Indikator.

## **THE PERFORMANCE OF DEVELOPMENT PLANNING AGENCY AT SUB-NATIONAL LEVEL (BAPPEDA) IN THE PREPARATION OF LOCAL GOVERNMENT WORK PLANS (RKPD)**

### **Abstract**

The present study is about the preparation of Kalimantan Barat's local government work plan (RKPD) in its attempt to uncover the role of Bappeda in the performance of local government work plans. The problem in this research is not optimal achievement of performance organizers of regional development and lack of timeliness in the preparation of development plans and annual budget area. To analyze this problem, researchers used the theory Dharma (2001: 154) is the measurement of the following: a) quantity; b) Quality; and c) Timeliness. The result of this research is the realization of economic growth did not reach the target of 5.02% and on human development indicators at all yet this realization can be said yet/ not successful in terms of quantity. Furthermore, people's perceived satisfaction based on the outcomes of quality performance in the preparation RKPD BAPPEDA Kalbar not so good as people think there are still people who were severely malnourished children's fund can not go to school means that the implementation of economic growth in West Kalimantan and quality not so good. Then in terms of timeliness was experiencing some of the barriers that lead to the realization hampered as the slow pace of disbursement of funds and the number of activities carried out by Bappeda so that the process of realization of berikutnya also affect the preparation RKPD the following year.

*Key Words: Bappeda, Work Plans, Achievement, Indicator.*

## A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, ada banyak sekali masalah yang terjadi, diantaranya masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah baik itu individu maupun kelompok. Masyarakat mulai mengerti dan selalu mengevaluasi terhadap kinerja apa yang telah dihasilkan oleh lembaga pemerintahan. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Berbagai permasalahan pembangunan saat ini, baik yang terjadi pada lingkungan strategis global, regional maupun lokal, menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah guna mengatasi permasalahan dan tantangan yang terjadi. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-

isu yang berdimensi lintas bidang. (data Rensra Bappeda Kalbar).

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Bappeda Kalbar isu strategis daerah tersebut mencakup a. bidang politik, ketentraman dan ketertiban, b. bidang pemerintahan, hukum dan HAM, c. bidang ekonomi, d. bidang sosial dan budaya, e. bidang infrastruktur, f. bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah. (data Bappeda Kalbar).

Rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan tahunan daerah yang

disebut rencana kerja. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat kerja daerah yang disebut rencana kerja. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat kerja daerah untuk periode 1 tahun. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan isu strategis daerah diatas, muncul indikator Makro pembangunan ekonomi. Sasaran indikator makro pembangunan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2014, ialah: (1). Pertumbuhan ekonomi (%) target 5,99, realisasi 5,02, (2). Angka kemiskinan (%) target 7,49, realisasi 8,07, (3). Angka pengangguran (%) target 3,27, realisasi 4,04, (4). Indeks pembangunan manusia (IPM) target 72,86 realisasi na (belum ada). (Sumber: Data capaian Rkpd Bappeda Kalbar 2016)

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Capaian Kinerja BAPPEDA dalam menyusun RKPD Kalimantan Barat. Adapun tujuan dan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis capaian kinerja BAPPEDA

dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Barat.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang ilmu administrasi public terutama kajian manajemen publik. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada instansi terkait yaitu Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RKPD.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kinerja**

Dwiyanto mengatakan (2006:47) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

### **Definisi Kinerja Menurut Para Ahli**

Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu". Secara lebih dalam kinerja juga dijelaskan sebagai pencapaian pegawai diluar tupoksi yang melekat padanya, sehingga dapat menciptakan produktifitas yang lebih baik.

### **Pengertian Perencanaan**

Menurut Coyers dan Hills (1994) perencanaan ialah suatu proses bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan Yulius Nyerere (1969) mendefinisikan perencanaan sebagai proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan kerana tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu bersamaan. Perencanaan adalah konsep yang terencana dan disusun secara sistematis oleh suatu badan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa, dan perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut

telah ditetapkan dan haruslah diimplementasikan.

### **Pengertian Pembangunan**

Menurut Siagian (1994) dia mendefinisikan pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa.

### **Indikator Kinerja**

Pasolong mengatakan (2007:177), indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI (1999:7), ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs) keluaran (output) hasil (outcomes) manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

### **Pengukuran Kinerja**

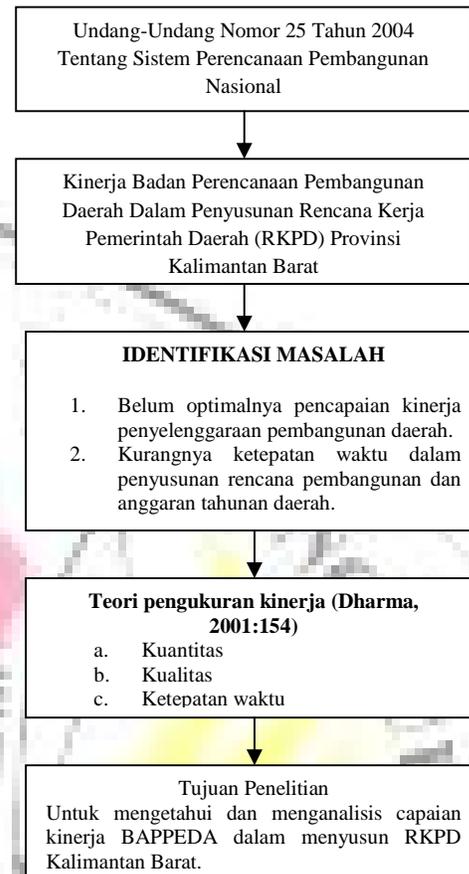
Pasolong mengatakan (2007:182) pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan,

program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

### Teori Mengukur Pelaksanaan Kegiatan

Dharma mengatakan (2001:154) menetapkan cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Banyak cara pengukuran yang dapat digunakan, seperti penghematan, kesalahan, dan sebagainya. Akan tetapi, hampir semua cara pengukuran mempertimbangkan hal-hal berikut. 1). Kuantitas, 2). Kualitas, 3). Ketepatan Waktu.

### Kerangka Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data lapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel yang disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Februari

2015 hingga September 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Bappeda, kepala bagian, kepala sub bagian, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles berman (Sugiono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik penelitian dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menganalisa kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Dharma yang mengemukakan beberapa indikator dalam

mengukur kinerja yaitu, 1). Kuantitas, 2). Kualitas dan 3). Ketepatan Waktu.

#### **Kuantitas**

Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2014 meliputi 4 (empat) indikator yang dimana indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan tabel sasaran indikator pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 2012-2016 yang telah dipaparkan di atas maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 Bappeda menargetkan capaian indikator pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 dan realisasinya sebesar 5,81, sementara itu pada tahun 2013 targetnya ialah 5,94 dan realisasinya 6,08, kemudian di tahun 2014 targetnya sebesar 5,99 dan realisasinya 5,05 begitu pula pada tahun 2015 targetnya sebesar 6,04 namun belum ada realisasinya, sama halnya dengan tahun 2016 targetnya sebesar 6,09 dan belum ada realisasinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan 2013 realisasi yang tercapai melebihi target yang ditunjukkan sebelumnya, namun pada tahun 2014 realisasi yang tercapai belum mencapai atau memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu pada tahun 2015 dan 2016 Bappeda hanya berhasil menyusun target namun belum ada realisasinya. Oleh karena kondisi tersebut maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Bappeda yang menyatakan bahwa: *“untuk membahas persoalan tersebut memang setiap tahunnya dalam sasaran indikator pertumbuhan ekonomi ini ditetapkan target yang hendak dicapai dengan adanya target maka akan ada tingkat keberhasilan kinerja kami apakah ditahun ini atau ditahun sebelumnya dan ditahun berikutnya kinerja kami dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Memang realisasi pada setiap tahunnya tidaklah selalu tercapai atau melebihi target, walaupun belum tercapai angkanya pun tidak terlalu jauh, namun kami tentu akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja kami.”* (hasil wawancara dengan Sy. Kamaruzaman M,Si. Selaku Sekretaris Bappeda, 03/10/2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Sekretaris Bappeda mengungkapkan

bahwa memang setiap tahunnya dalam sasaran indikator makro pembangunan ekonomi Kalbar ditetapkan sebuah target yang dimana target tersebut menjadi sebuah indikator keberhasilan ataupun rencana kinerja Bappeda dalam merealisasikan RKPD. Jika melihat dari data yang ada maka pada tahun 2014 realisasi yang tercapai sekitar 5,02 sementara target yang ditetapkan sebesar 5,99, artinya pencapaian kinerja Bappeda dalam bentuk kuantitas di RKPD tahun 2014 belumlah tercapai. Kurang berpartisipasinya anggota dewan dalam menghadiri dan menyumbangkan pokok pikiran berdasarkan masyarakat inilah salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014.

Jika dilihat dari data di atas maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 Sasaran indikator angka kemiskinan Kalimantan Barat mempunyai target sebesar 6,81 dan realisasinya sebesar 7,96. Kemudian pada tahun 2013 targetnya sebesar 7,69 dan realisasinya sebesar 8,74. Sementara itu pada tahun 2014 targetnya sebesar 7,49 dan realisasinya sebesar 8,07. Selanjutnya tahun 2015 targetnya sebesar 6,52 namun belum ada realisasinya. Sama halnya dengan tahun 2015 di tahun 2016 ini

targetnya sebesar 5,72 dan belum ada realisasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 capaian realisasi telah melebihi atau memenuhi dari target yang hendak dicapai. Untuk indikator angka kemiskinan pada tahun 2014 ini ternyata realisasinya melebihi target, tidak seperti pada indikator pertumbuhan ekonomi, pada indikator ini kinerja Bappeda dapat dikatakan berhasil dalam segi kuantitas pada RKPD Kalbar.

Berikutnya adalah indikator ketiga yakni angka pengangguran dalam penyelenggaraan pembangunan pada tingkat Kab/Kota yang terdapat pada RKPD Kalbar tahun 2014 yang meliputi: Tingkat pengangguran di kabupaten/kota meliputi: Sambas 3,70 persen, Bengkayang 3,74 persen, Landak 3,34 persen, Mempawah 5,57 persen, Sanggau 3,25 persen, Ketapang 2,06 persen, Sintang 3,06 persen, Kapuas Hulu 2,02 persen, Sekadau 0,31 persen, Melawi 2,46 persen, Kayong Utara 4,08 persen, Kubu Raya 6,18 persen, Kota Pontianak 7,05 persen, Kota Singkawang 8,22 persen.

Dilihat dari data tersebut bahwa tingkat angka pengangguran tertinggi ada di kabupaten Kota Singkawang yang tingkat

penganggurannya mencapai 8,22 persen, sedangkan angka pengangguran terendah ada di kabupaten Sekadau yang angka penganggurannya mencapai 0,31 persen.

Jika melihat kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa Bappeda menyusun RKPD untuk indikator angka pengangguran pada tahun 2012 menaruh target yang cukup besar sekitar 10,65 namun realisasi yang tercapai hanyalah sebesar 3,48. Hal ini ternyata mempengaruhi Bappeda dalam menyusun target di tahun berikutnya dengan hanya berkisar pada angka 3 saja. Oleh karena fenomena tersebut maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Bappeda yang menyatakan bahwa: *“pada indikator angka pengangguran ini pada mulanya ditahun 2012 emang kami menetapkan target yang tinggi sebesar sepuluh koma tapi dikarenakan berbagai hal capaian realisasinya hanya sekitar tiga koma saja. Oleh karena itulah maka ditahun berikutnya kami tidak berani untuk menetapkan target yang tinggi. Karena kalau bicara masalah pengangguran khususnya di Kalimantan Barat masalahnya sudah cukup kompleks tidak bisa di selesaikan dalam waktu singkat. Perlu tahap demi tahap untuk mengurangi bahkan menuntaskan masalah pengangguran ini.”*

(hasil wawancara dengan Bapak Sy. Kamaruzaman, 03/10/2016).

Kemudian yang menjadi indikator terakhir dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan RKPD Kalbar tahun 2014 yakni indeks pembangunan manusia (IPM) pada tingkat Kab/Kota yang meliputi: Indeks pembanguana manusia di kabupaten/kota meliputi; Sambas 66,81 persen, Bengkayang 69,38 persen, Landak 69,58 persen, Mempawah 10,13 persen, Sanggau 70,03 penrsen, Ketapang 69,74 persen, Sintang 69,81 persen, Kapuas Hulu 70,97 persen, Sekadau 68,99 persen, Melawi 69,86 persen, Kayong Utara 66,83 persen, Kubu Raya 69,83 persen, Kota Pontianak 74,64 persen, Kota Singkawang 70,66 persen.

Dilihat dari data tersebut bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ada di Kota Pontianak dengan angka mencapai 74,64 persen dan indeks pembangunan manusia terendah ada di Kabupaten sambas dengan angka 66,81 persen.

Dengan demikian setelah memaparkan semua capaian yang telah terealisasi oleh Bappeda dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan RKPD Kalbar tahun 2012-2016 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja

Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar berhasil pada indikator angka kemiskinan dan angka pengangguran sementara pada indikator pertumbuhan ekonomi yang realisasinya tidak mencapai target dan pada indikator indeks pembangunan manusia yang sama sekali belum ada realisasinya ini dapat diaktakan belum/ tidak berhasil dilihat dari segi kuantitas.

### **Kualitas**

Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. Secara umum kualitas adalah segala sesuatu yang menyangkut kemampuan dan kemauan pegawai untuk menghasilkan output yang relevan dalam meningkatkan produktivitas kerja, dengan kata lain kualitas kerja adalah mutu pekerjaan yang dihasilkan pegawai. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Bappeda mengenai persoalan kualitas hasil kerja dalam penyusunan RKPD Kalbar yang menyatakan bahwa: *“kita berbicara kinerja dari hulu sampai kehilir, hulunya itu bagaimana dokumen perencanaan itu dipedomani oleh pemerintah daerah, pedoman ini disepakati*

*keputusan politik anggaran dewan. Dewan juga punya hak untuk resep, dimasukkan pokok pikiran itulah diakumulir dalam musrembang. Begitu musrembang selesai, semua daftar-daftar kebutuhan dan juga keinginan, sesuaiilah dengan keinginan, ketok palulah. Dengan ketok palu itu, kemudian harus di shering ke SKPD yang menangani kegiatan itu, nah dari ini tentu ada yang namanya RKPJM. Inilah untuk mengevaluasi RKPD tahun sebelumnya pemerintah daerah. Misalnya dia menargetkan kemiskinan 8 % kok jadi 8,1 %, ada apa?." (Hasil wawancara dengan Sy. Kamaruzaman, M.Si, 18/04/2016.*

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam penyusunan RKPD terdapat beberapa persoalan ataupun masalah penting yang dimana sebagian besar anggota dewan tidak ikut berpartisipasi sehingga aspirasi dari masyarakat kurang tertuang pada isi dari RKPD. Sementara pada dasarnya kualitas adalah pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, pada konteks ini yang dimaksud dengan tingkat kepuasan adalah kepuasan dari Bappeda maupun kepuasan dari masyarakat Kalbar. Jika dilihat dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan kepuasan Bappeda dalam menyusun RKPD

Kalbar belum begitu maksimal karena tidak adanya aspirasi dari masyarakat maupun ide-ide pokok dari para anggota Dewan sehingga RKPD yang telah dibuat hanya berdasarkan pemikiran Bappeda saja.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan masyarakat mengenai seperti apa dan bagaimana kepuasan dari masyarakat itu sendiri: *"bagi saya sih dek, untuk masalah mengenai pembangunan ekonomi sekarang ini sih belum begitu maksimal, karena seperti di daerah saya ni masih ada yang mengalami gizi buruk, ada yang mengalami anaknya tidak bisa sekolah walaupun biaya sekolah sekarang tidaklah mahal." (hasil wawancara dengan bapak Gunawan, S.Sos selaku masyarakat Kalbar, 03/10/2016).*

Dilihat dari hasil wawancara diatas mengungkapkkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bappeda berdasarkan RKPD Kalbar ternyata kurang begitu maksimal karena menurut pendapat masyarakat masih terdapatnya penderita gizi buruk serta adanya anak yang tidak bisa sekolah, artinya penilaian kualitas kinerja Bappeda berdasarkan kepuasan masyarakat tidaklah baik.

Dilihat dari aspek daya saing daerah pada tahun 2014 terjadi terdapat beberapa uraian yang mengalami kenaikan dan

penurunan dikarenakan kebutuhan setiap masyarakat yang berbeda sehingga berpengaruh pada aspek daya saing daerahnya, seperti yang diungkapkan Bapak Sy. Kamaruzaman menyatakan: *“Dari semua aspek tersebut tidak semua yang negative itu buruk karena setiap penurunan dan peningkatan semua aspek tersebut mempunyai penilaian apakah semua aspek tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak, dari laporan data setiap tahunnya kami mendapati perbedaan tersebut memang peningkatan dan penurunan semua aspek tersebut menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan pastinya berkelanjutan.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Sy. Kamaruzaman, 18/04/2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan sekretaris Bappeda dapat dilihat bahwa peningkatan dan penurunan setiap aspek berpengaruh pada pencapaian setiap tahunnya.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Arah pembangunan Nasional

merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris Bappeda Bapak Sy. Kamaruzaman menyatakan: *“Masalah waktu sangat penting dalam penyusunan RKPD, kenapa? Karena dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut perencanaan semua harus berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan, tetapi kan kita tau bahwa setiap kegiatan pasti memiliki hambatan yang tidak terduga, hal yang tidak terduga itulah kita selidiki penyebabnya kenapa. Bahwasannya anggaran adalah salah satu masalah utama kenapa kegiatan pelaksanaan tersebut memakan waktu yang agak lebih panjang dari waktu yang sudah*

*ditentukan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Sy. Kamaruzaman, 18/04/2016)*

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Suratna selaku kelompok jabatan fungsional perencanaan Bappeda: *“Yang menjadi masalah terkadang karena banyaknya kegiatan sehingga dalam penyusunan RKPD membutuhkan waktu yang lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan, itu sangat berpengaruh sekali bagi kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD.” (Hasil wawancara dengan Ibu Suratna, 19/04/2016).*

Dilihat dari kedua hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu penyebab dari ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan RKPD yakni yang pertama ialah persoalan keterlambatan cairnya anggaran yang menjadikan keterlambatan untuk memulai suatu penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dan yang kedua ialah banyaknya kegiatan dari Bappeda sehingga dalam penyusunan RKPD menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

## **E. KESIMPULAN**

### **1. Kuantitas**

Setelah mengetahui hasil capaian dari semua indikator dalam penyelenggaraan pembangunan berdasarkan RKPD Kalbar tahun 2012-2016 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar berhasil pada indikator angka kemiskinan dan angka pengangguran sementara pada indikator pertumbuhan ekonomi yang realisasinya tidak mencapai target dan pada indikator indeks pembangunan manusia yang sama sekali belum ada realisasinya ini dapat diaktakan belum/ tidak berhasil dilihat dari segi kuantitas.

### **2. Kualitas**

Penilaian terhadap capaian kualitas dalam kinerja Bappeda pada penyusunan RKPD Kalbar yang dimana terdapat ketidakpuasan Bappeda dikarenakan isi dari RKPD yang kurang mencakup ide ataupun pokok pikiran para anggota dewan sehingga aspirasi masyarakat tidak terealisasi, selanjutnya kepuasan yang berdasarkan yang dirasakan masyarakat terhadap capaian kualitas kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar belum begitu baik karena masyarakat beranggapan bahwa jika masih ada penduduk yang mengalami gizi buruk

dan anak-anak yang tidak bisa bersekolah artinya penyelenggaraan pembangunan ekonomi di Kalbar belum begitu baik maupun berkualitas,.

### 3. Ketepatan Waktu

Penyusunan RKPD yang masa realisasinya berjangka waktu satu tahun ternyata mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan realisasinya terhambat seperti lambatnya proses pencairan dana dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sehingga proses perealisasi berikutnya juga terhambat, dan hal tersebut juga mempengaruhi penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

### F. SARAN

1. Untuk Bappeda hendaknya meningkatkan tetapan target dalam pencapaian sasaran indikator penyelenggaraan pembangunan ekonomi agar realisasinya juga akan meningkat.
2. Untuk Bappeda hendaknya lebih dapat mengkomunikasikan secara lebih intensif dengan para anggota dewan dalam penyelenggaraan rapat penyusunan RKPD Kalbar, agar aspirasi masyarakat juga dapat

terrealisasikan dalam bentuk RKPD Kalbar.

3. Untuk Bappeda hendaknya dapat lebih mengelola sumber daya khususnya dalam sumber dana dan manajemen kegiatan-kegiatan lainnya agar perealisasiannya tidak terhambat serta penyusunan RKPD hendaknya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan didalam pedoman penyusunan RKPD.

### G. REFERENSI

#### Buku

Denim, Sudarwan. 2008. *Kinerja Staf Dan Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dharma, Agus. 2001. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM (Gadjah Mada University Press).

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT RefikaAditama.

-----, 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama.

-----, 2010. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moehariono, 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU) Perencanaan, Aplikasi Dan Pengembangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moleong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wirawan, 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Data Manusia Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Jakarta: Edward Tanujaya

Moenir, 2014. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarsih, Atik Septik dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roziqin, Muhammad Zainur. 2010. *Kepuasan Kerja*. Malang: Averroes Press.

Surjadi, 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Simanjutak, Payaman J, 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Sudarmanto, 2009. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung :Alfabeta.

-----, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah, 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Yogyakarta: KencanaPrenada Media Group.

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: RajawaliPers

Widjaja, Haw. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta Utara: Rajawali Pers.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Sumi Lisa  
 NIM / Periode lulus : E01111029 / Periode I  
 Tanggal Lulus : 30 September 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Sumiprotectif11@gmail.com / 0852-4506-7607

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Kinerja Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 09 November 2016  
Sumi Lisa  
 NIM E01111029

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)